KEMENTERIAN AGAMA

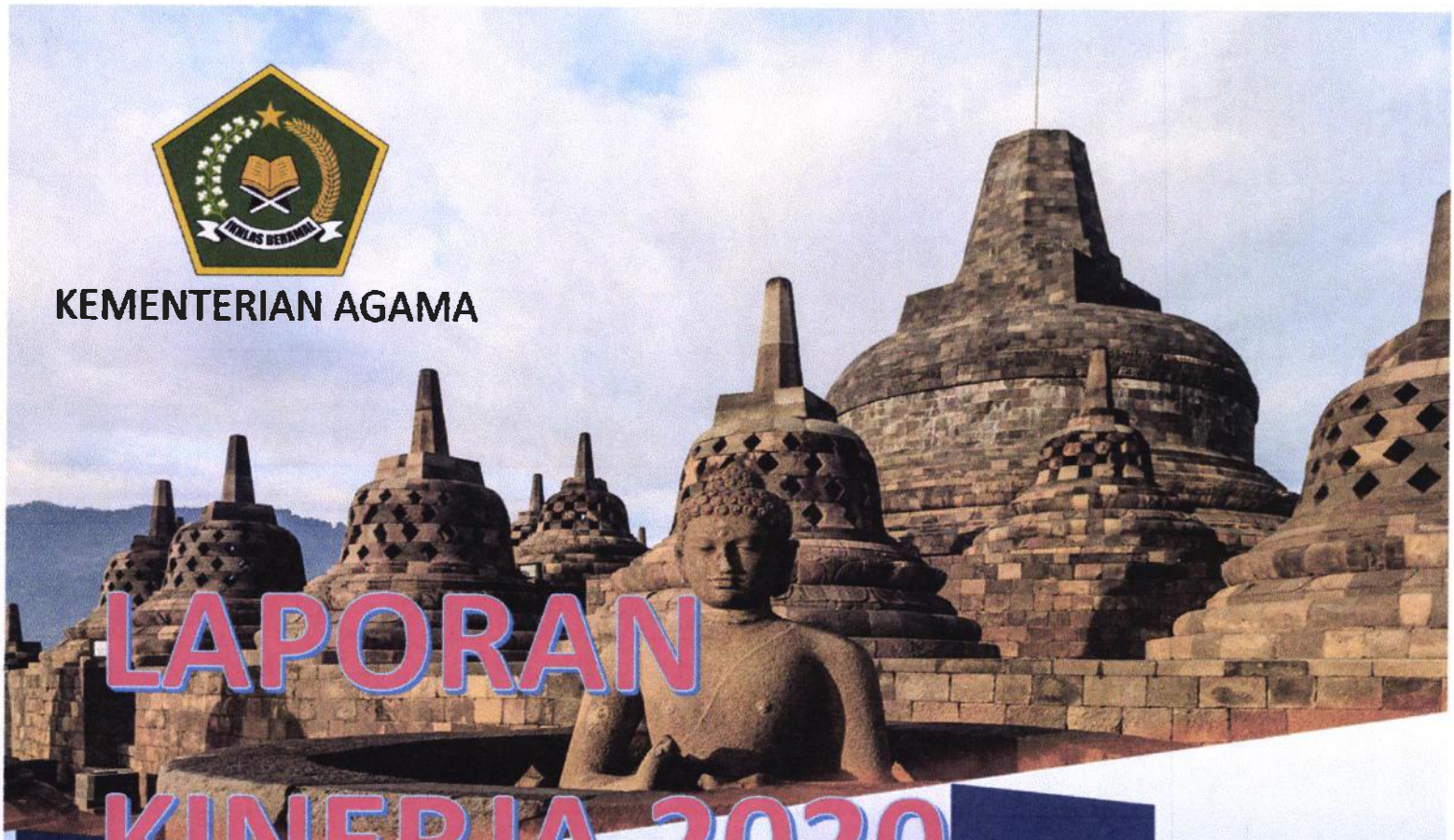

LAPORAN KINERJA 2020 TRIWULAN I

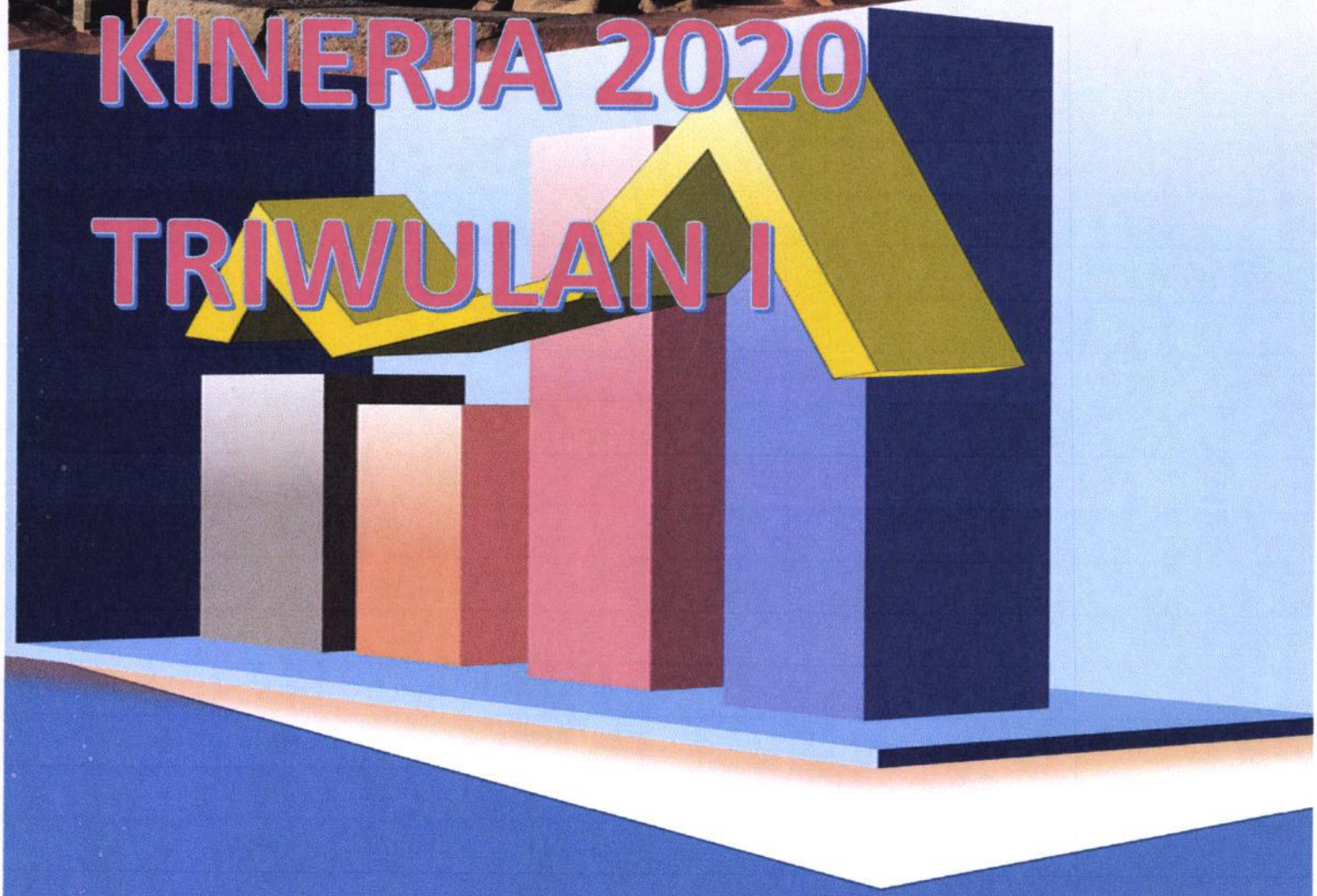

DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa, berkat metta dan karuna-Nya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud secara ringkas dituangkan dalam Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terkait dengan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, dan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan Menteri Agama.

Laporan ini berisi informasi tentang kinerja Ditjen Bimas Buddha sampai dengan triwulan I, realisasi anggaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2020 dan kendala dalam pencapaian target kinerja. Dari indikator kinerja utama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sampai dengan Triwulan I tahun 2020 sebanyak sepuluh sasaran strategis dan dua puluh dua indikator kinerja utama dengan rerata capaian sebesar 38,60% dengan realisasi anggaran per 31 Maret 2020 sebesar 15,14% dari pagu anggaran Rp. 244.310.235.000,-.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Jakarta, April 2020
Direktur Jenderal

Caliadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
I	PENDAHULUAN	.....	1
II	PERENCANAAN KINERJA	.....	6
III	AKUNTABILITAS KINERJA	.....	10
	A. PENGUKURAN KINERJA	.....	10
	B. CAPAIAN ANGGARAN	.....	19
	C. KENDALA DAN RENCANA TINDAK	.....	21
IV	PENUTUP	.....	23

I

PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisai dan tata Kerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas melaksanakan program bimbingan masyarakat Buddha dengan menyelenggarakan koordinasi pelaksanan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Ditjen Bimas Buddha.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi Ditjen Bimas Buddha selama Triwulan II tahun amggaran 2020 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbaga kegiatan tersebit diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Ditjen Bimas Buddha sehingga target kinerja dapat tercapai.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam rncana strategis Ditjen Bimas Buddha dan penetapan kinerja tahun 2020.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II tahun 2020, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016. Melalui Laporan Knerja ini diharapkan dapat mejadi informasi kinerja Ditjen Bimas Buddha sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabiltas kinerja pada masa yang akan dating. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Ditjen Bimas Buddha dapat lebih meingkatkan tugasa dan fiungsinya dalam rangka pencpaian target kinerja.

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat

Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan keagamaan Buddha;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan

   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut struktur oragnisasi Ditjen Bimas Buddha terdiri dari:

A. Sekretariat Ditjen Bimas Buddha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada direktorat jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan system informasi direktorat jendaral;
2. Bagian Keuangan dan Umu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan BMN pada direktorat jenderal;

3. Bagian Organisasi, Kpegawaia dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan advokasi hokum serta penyusunan peraturan perundang-undangan pada direktorat jenderal.

Bagan struktur Sekretariat

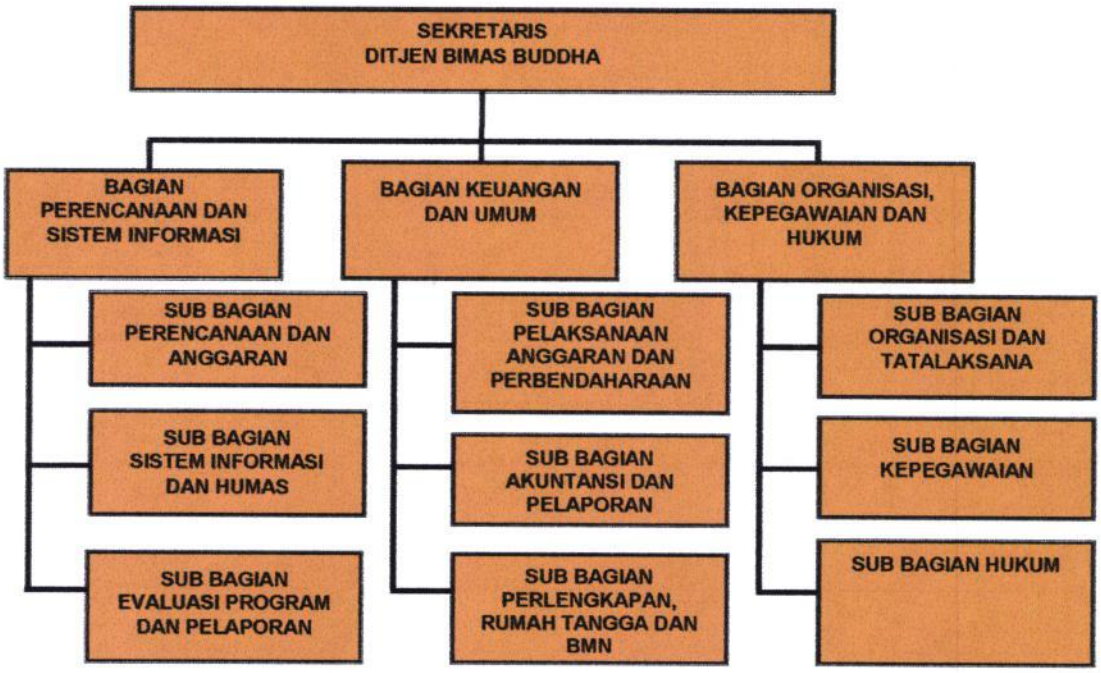

B. Direktorat Urusan an Pendidikan Agama Buddha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan dan pendidikan agama Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Subdit Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang kelembagaan agama Buddha.
2. Subdit Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan agama Buddha.

3. Subdit Pendidikan dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah.
4. Subdit Pendidikan tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi keagamaan Buddha.

Bagan Struktur Direktorat Urusan dan Pendidikan

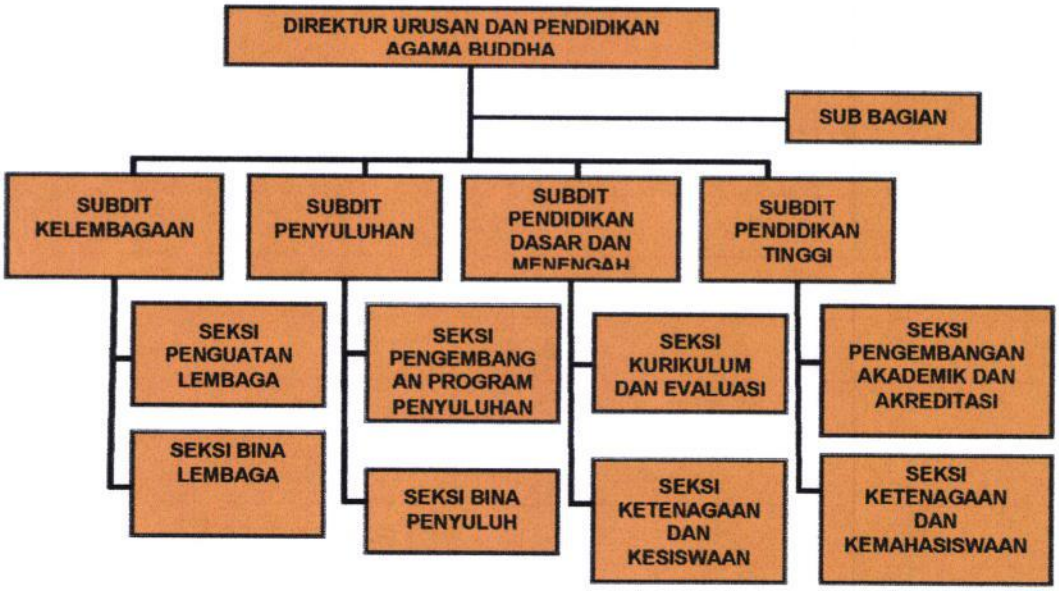

1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Ditjen Bimas Buddha sampai akhir triwulan II Tahun 2020. Membandingkan antara capaian kinerja (performance results) dengan rencana kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bimas Buddha adalah sebagai berikut:

Bab. I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja program tahun 2020.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Ditjen Bimas Buddha sampai akhir triwulan II tahun 2020, kendala, dan rekomendasi.

Bab IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Ditjen Bimas Buddha sampai akhir triwulan II tahun 2020 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

II

PERENCANAAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

2.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Agama pada renstra 2020 – 2024 merujuk pada visi Presiden Republik Indonesia yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berdasarkan Gotong Royong".** Dengan memperhatikan tugas dan fungsi, Kementerian Agama menetapkan Visi tahun 2020-2024.yaitu;

"Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotng royong".

Visi Kementerian Agama kemudian dijabarkan kedalam misi tahun 2020-2024 yaitu;

Misi Kementerian Agama

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama
3. Menigkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing Pendidikan
6. Memantapkan tatkelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Dalam renstra 2020 – 2024, Ditjen Bimas Buddha menjabarkan visi dan misi Kemeterian agama kedalam tujuan dan sasaran strategis pada program bimbingan masyarakat Buddha.

Tujuan yang sudah dirumuskan oleh Ditjen Bimas Buddha adalah:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan berkualitas;

5. Peningkatan lulusan Pendidikan yang produktif san memiliki daya saing kompetitif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif;

Dari enam tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran program Ditjen Bimas Buddha tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kesalehan umat beragama Buddha
2. Meningkatnya moderasi beragama umat Buddha
3. Meningkatnya kerukunan umat beragama
4. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan
5. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan
6. Meningkatnya partisipasi pendidikan agama dan keagamaan Buddha
7. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha
8. Meningkatnya relevansi dan daya saing Pendidikan
9. Menguatnya karakter peserta didik agama Buddha
10. Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Buddha yang efektif dan akuntabel

Dalam pencapaian sasaran strategis diatas Ditjen Bimas Buddha didukung dengan lima kegiatan utama yaitu:

1. Pembinaan dan pengelolaan urusan agama Buddha
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan agama Buddha
4. Administrasi perkantoran Pendidikan agama Buddha
5. Peningkatan akses, mutu,

2.2. Target Kinerja

Pada tahun 2020 perjanjian kinerja Ditjen Bimas Buddha yang sudah ditetapkan dan ditandatangani bersama Dirjen Bimas Buddha dan Menteri Agama. Adapun rincian target sasaran program Ditjen Bimas Buddha tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Table 1. Target kinerja Ditjen Bimas Buddha tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya partisipasi pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1	APK Nava Dhammasekha	0.0001%
		2	APK PTK Buddha	0.006%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1	Persentase PTK Buddha yang terakreditasi minimal Baik Sekali	50%
		2	Rerata nilai IPK PTK Buddha	2.8
		3	Persentase guru Nava Dhammasekha bersertifikat pendidik	60%
		4	Persentase guru Pendidikan agama Buddha yang bersertifikat pendidik	60%
		5	Persentase dosen PTK Buddha yang bersertifikat pendidik	18%
3.	Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan	1	Persentase jurnal terakreditasi	10%
		2	Persentase jurnal ilmiah internasional yang tersitasi	10%
		3	Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja	50%
4.	Menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas dan budi pekerti	Rerata nilai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada sekolah		76
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Buddha yang efektif dan akuntabel	1	Nilai PMPRB	82
		2	Persentase penurunan temuan administrasi keuangan	60%
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	76
		4	Nilai PMPZI	75
		5	Indeks profesionalitas ASN	80
6.	Meingkatnya kualitas penyiaran agama yang berwawasan moderat	Rasio penyuluh agama dengan kelompok binaan yang mendapatkan bimbingan moderasi beragama		1 : 4
7.	Menguatnya system pendidikan yang berspektif moderat	Nilai USBN pendidikan agama yang berwawasan moderat		76

8	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat bergama	Prosentase kasus konflik intra Bergama yang diselesaikan	75%
9	Meningkatnya akspresi budaya bemafap agama	Persentase lembaga seni budaya keagamaan yang dibina	50%
10	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Persentase layanan administrasi keagamaan yang digitalisasi	50%
		Prosentase kitab suci yang terdistribusi tepat sasaran	100%

Sesuai penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2020 sebagaimana tercantum diatas didukung dengan program dan kegiatan-kegiatan yang memadai untuk dapat mecapai target pada akhir tahun angaran 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Ditjen Bimas Buddha

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikatorindikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk angka dari 0 sampai 100 + N yang kemudian diberikan kategori peringkat dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria/kategori Capaian Kinerja

< 100	Sangat baik
80 - 100	Baik
50 - 79	Cukup
X > 50	Kurang

Dari hasil pengukuran akan diperoleh capaian kinerja organisasi Diten Bimas Buddha Triwulan I tahun 2020. Capai kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Triwulan I tahun 2020 adalah 38,60%. Capaian tersebut diperoleh dari rerata capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya partisipasi pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1	APK Nava Dhammasekha	0,001	0.0036	360%
		2	APK PTK Buddha	0.006	0,006	100%
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1	Persentase PTK Buddha yang terakreditasi minimal Baik Sekali	50%	0	0
		2	Rerata nilai IPK PTK Buddha	2,8	0	0
		3	Persentase guru Nava Dhammasekha bersertifikat pendidik	60%	0	0
		4	Persentase guru Pendidikan agama Buddha yang bersertifikat pendidik	60%	55,40%	92,33%
		5	Persentase dosen PTK Buddha yang bersertifikat pendidik	18%	48,92%	271,78%
3.	Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan	1	Persentase jurnal terakreditasi	10%	0	0
		2	Persentase jurnal ilmiah internasional yang tersitasi	10%	0	0
		3	Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja	50%	0	0
4.	Menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas dan budi pekerti	1	Rerata nilai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada sekolah	76	0	0
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Buddha yang efektif dan akuntabel	1	Nilai PMPRB	82	0	0
		2	Persentase penurunan temuan administrasi keuangan	60%	0	0
		3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	76	0	0
		4	Nilai PMPZI	75	0	0
		5	Indeks profesionalitas ASN	80	0	0
6.	Meingkatnya kualitas penyiaran agama yang berwawasan moderat	1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok binaan yang mendapatkan bimbingan moderasi beragama	1 : 4	1 ; 16	25%
7.	Menguatnya system pendidikan yang berspektif moderat	1	Nilai USBN pendidikan agama yang berwawasan moderat	76	0	0

8	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat bergama	1	Prosentase kasus konflik intra Bergama yang diselesaikan	75%	0	0
9	Meningkatnya ekspresi budaya bernafap agama	1	Persentase lembaga seni budaya keagamaan yang dibina	50%	0	0
10	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	1	Persentase layanan administrasi keagamaan yang digitalisasi	50%	0	0
		2	Prosentase kitab suci yang terdistribusi tepat sasaran	100%	100%	100%

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020 capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama belum dapat dilakukan pengukuran. Indikator kinerja utama tahun 2020 sebagian merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Namun sebagai bentuk tanggungjawab Ditjen Bimas Buddha akan menguraikan capaian kinerja dari setiap sasaran program sebagai berikut:

1. **Sasaran Program 1 Meningkatnya partisipasi pendidikan agama dan keagamaan Buddha**

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu APK Nava Dhammasekha, dan APK PTK Buddha tercapai 100%. Sampai dengan triwulan I APK Nava Dhammasekha adalah atau tercapai 0,0036 atau 360% dan APK PTK Buddha tercapai 0,006 atau 100%.

Indikator kinerja APK Nava Dhammasekha didapat dari perhitungan jumlah siswa Nava Dhammasekha dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia usia 3 sampai dengan 6 tahun dikali 100. Data jumlah penduduk didapat dari laporan APK Paud Kementerian Pendidikan dengan jumlah 19.214.227 orang. Sedangkan jumlah siswa Nava Dhammasekha pada tahun 2019 triwulan I adalah 690 orang. Untuk APK pendidikan tinggi keagamaan Buddha prinsip perhitungan sama dengan APK Nava Dhammasaekha yaitu perbandingan anta jumlah mahasiswa pada PTK Buddha dengan jumlah penduduk usia 19 sampai dengan 24 tahun dikali 100. Pada tahun 2020 triwulan I jumlah mahasiswa PTK Buddha sebanyak 1339 orang dan jumlah penduduk Indonesia usia 19 sampai dengan 19 tahun sebanyak 21.964.200 orang.

Indikator kinerja utama juga akan tercapai jika didukung oleh indikator kinerja kegiatan yang memadai. Indkiator kinerja kegiatan yang ditetapkan dan dianggap relevan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut yaitu Persentase persentase Nava Dhammasekha penerima BOP, Persentase sarana prasarana Nava Dhammasekha yang memenuhi standar, Persentase mahasiswa penerima BIDIKMISI, Persentase mahasiswa penerima Beasiswa, Persentase PTK Buddha penerima BOPTN, Persentase mahasiswa penerima PIP, dan Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi keagamaan Buddha yang memenuhi standar.

Ditjen Bimas Buddha pada triwulan I dalam upaya pencapaian IKU telah melakukan langkah-langkah antara lain melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga keagamaan Buddha untuk dapat ikut serta menyukseskan program sekolah Dhammasekha terutapa untuk tingkat Nava Dhammasekha sebagai awal pelaksanaannya. Untuk APK PTK Buddha Ditjen Bimas Buddha juga telah melakukan konsolidasi dan korrdinasi kepada ketua STAB baik negeri maupun swasta agar kiranya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan promosi terhadap sekolah tinggi agama Buddha sehingga akan banyak masyarakat Buddha yang akan masuk mengikuti pendidikan di STAB tersebut.

2. Sasaran program 2 Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu Persentase PTK Buddha yang terakreditasi minimal Baik Sekali, Rerata nilai IPK PTK Buddha, Persentase Nava Dhammasekha yang terakreditasi, Persentase guru Nava Dhammasekha yang profesional, Persentase guru Pendidikan agama Buddha yang profesional, dan Persentase dosen PTK Buddha yang profesional tercapai 100%.

Indikator kinerja utama persentase PTK yang terakreditasi minimal baik sekali pada triwulan I tercapai 0%. Untuk indikator ini belum dapat terpenuhi karena sampai saat ini belum ada institusi PTK Buddha yang mendapat akreditasi baik sekali (A) tetapi yang mendapatkan akreditasi B sebanyak 5 PTK.

Indikator rerata nilai IPK PTK Buddha pada triwulan I capaian belum dapat diukur. Untuk IKU ini akan didapat data penilaian pada triwulan III.

Indikator Persentase guru Nava Dhammasekha bersertifikat pendidikan ini juga belum mendapatkan data akurat sehingga belum dapat diperhitungkan berapa persen guru nava dhammasekha yang bersertifikat. Indikator kinerja utama Persentase guru pendidikana agama Buddha yang bersertifikat pendidik pada triwulan I tercapai 54,40% dari target 60% atau 92,33%. Capaian ini didapatkan dari jumlah guru agama Buddha yang bersertifikat dibagi jumlah guru pendidikan agama Buddha. Jumlah guru agama Buddha sebnayak 1.668 orang dan yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 924 orang.

Indikator kinerja utama Persentase dosen PTK Buddha yang bersertifikat pendidik pada triwulan I tercapai 48,92% dari target 18% atau 271,78%. Capaian ini didapat dari jumlah dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik dibagi denngan jumlah dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jumlah dosen adalah 139 dan dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 48 orang. Sedangkan target tahun 2019 adalah 18% atau 25 orang.

Indikator kinerja utama ini akan tercapai jika didukung oleh indikator kinerja kegiatan yang memadai. Indikator kinerja yang ditetapkan dan dianggap relevan untuk mendukung pencapaian IKU yaitu Persentase prodi PTK Buddha yang terakreditasi minimal Baik Sekali, Persentase PTK Buddha yang terakreditasi minimal Baik Sekali, Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan bersertifikat, Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi S1, Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkinerja baik, Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkompeten, dan Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima penghargaan

3. Sasaran program 3 Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu Persentase jurnal terakreditasi, Persentase jurnal ilmiah internasional yang tersitasi, dan Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja tercapai 100%.

Pada triwulan I untuk indikator kinerja utama Persentase jurnal terakreditasi untuk tahun 2020 akan disajikan pada triwulan IV. Dan untuk

indikator kinerja utama Persentase jurnal ilmiah internasional akan disajikan pada triwulan IV.

Untuk indikator kinerja utama Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja adalah jumlah mahasiswa yang lulus pada tahun ajaran 2019/2020 dan akan diperoleh datanya pada triwulan II atau IV.

Indikator kinerja utama ini akan tercapai jika didukung oleh indikator kinerja kegiatan yang memadai. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan oleh zditjen Bimas Buddha dan dianggap relevan mendukung pencapaian IKu yaitu Persentase pendidik pada pendidikan tinggi keagamaan Buddha yang berkualifikasi S3, Persentase pendidik pada pendidikan tinggi keagamaan Buddha yang bersertifikat, Persentase pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi keagamaan Buddha yang berkompeten, Persentase lulusan bersertifikat kompetensi/sertifikat profesi, Persentase mahasiswa mengikuti kompetisi nasional dan internasional, Persentase PTK Buddha yang memiliki inovasi IPTEK, persentase karya ilmiah yang mendapat hak paten, Persentase PTK Buddha yang memiliki program pengabdian masyarakat.

Dalam pencapaian target IKU Ditjen Bimas Buddha pada triwulan I telah melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada PTAB untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan pada PTAB.

4. Sasaran program 4, Menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas dan budi pekerti

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu rerata nilai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada sekolah dapat dicapai sessuai target. Indikator ini capaiannya dapat diketahui setiap habis ujian semester I dan semester II.

Indikator kinerja utama ini akan tercapai jika didukung oleh indikator kinerja kegiatan yang memadai. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan oleh Dtjen Bimas Buddha dan dianggap relevan untuk mendukung pencapaian IKU yaitu Prosentase peserta didik yang memperoleh pembinaan dan penguatan karakter.

5. **Sasaran program 5, Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Buddha yang efektif dan akuntabel**

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), Persentase penurunan temuan administrasi keuangan, Nilai akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Nilai penilaian mandiri zona integritas (PMPZI), , dan Indeks profesionalitas ASN tercapai 100%.

Pada Triwulan I tahun 2020 dari empat indikator kinerja utama untuk nilai PMPRB belum dapat penilaian kemingkinan besar penialan PMPRB oleh TPI akan dilakukan kisaran triwulan II atau III. Untuk mendukung pencapaian IKU ini Ditjen Bimas Buddha pada triwulan I telah melakukan penilaian melalui lembar kerja evaluasi (LKE) manual karena sistem e-PMPRB dari Kemenpan RB masih dalam perbaikan dan membentuk dan menyusun TIM POKJA RB Ditjen Bimas Buddha tahun 2020.

Untuk indikator kinerja utama Persentase tindaklanjut hasil pengawasan pada triwulan I masih dalam proses pendataan hasil pemeriksaan dan yang sudah ditindaklanjuti. Untuk mendukung pencapaian IKU ini pada triwulan I Ditjen Bimas Buddha telah melakukan beberapa hal yaitu melakukan rapat bersama pejabat dan pegawai Ditjen BBimas Buddha tentang tindaklanjut hasil pengawasan, telah menerbitkan surat edaran kepada semua pegawai tentang tindaklanjut hasil pengawasan yang bersifat material.

Untuk nilai Akuntabiltas juga belum dilakukan penilaian oleh TPI. Penilaian akuntabilitas biasanya akan dilakukan pada triwulan III. Untuk mendukung pencapaian IKU ini pada triwulan I Ditjen Bimas Buddha telah melakukan persiapan untuk menghadapi penilaian akuntabiltas dengan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung penilaian SAKIP.

Untuk indikator PMPZI nilai berdasarkan penilaian mandiri melalui aplikasi e-PMPZI Kementerian Agama. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama ini padda triwulan I tahun 2020 Ditjen Bimas Buddha telah melakukan pembentukan tim Pokja PMPZI Ditjen Bimas Buddha tahun 2020 dan sudah melakukan pengisian LKE PMPZI secara manual sebelum nantinya dilakukan dengan sistem yaitu e-PMPZI.

Untuk indikator kinerja utama indeks profesionalitas ASN Ditjen bimas Buddha pada triwulan I belum mendapatkan nilai indeks profesionalitas ASN

Ditjen Bimas Buddha, karena indeks akan diambil dari hasil survey yang dilakukan bekerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Agama.

6. **Sasaran program 6, Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berwawasan moderat**

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu rasio penyuluh agama dengan kelompok binaan yang mendapatkan bimbingan moderasi beragama tercapai 100%. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 tercapai 1:16 atau 25% dari target 1 : 4.

Tercapai 25% karena jumlah penyuluh agama Buddha PNS hanya 48 orang dengan rasio 1 : 4 dimana 1 penyuluh agama PNS melakukan pembinaan kepada 4 rumah ibadah sedangkan rumah ibadah agama Buddha yang terdaftar melalui SIORI sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebanyak 771 rumah ibadah. Dari data yang ada tersebut diperoleh hasil bahwa 1 orang penyuluh PNS membina 16 rumah ibadah sehingga jika target akan dipenuhi maka Ditjen Bimas Buddha masih membutuhkan penyuluh PNS sebanyak 145 orang.

Dalam pencapaian target indikator kinerja utama tersebut didukung dengan indikator kinerja kegiatan yang dianggap relevan yaitu pembinaan penyuluh agama Buddha PNS dan Non PNS, pemberian tunjangan bagi penyuluh non PNS.

7. **Sasaran program 7, Menguatnya system pendidikan yang berspektif moderat**

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu nilai USBN pendidikan agama yang berwawasan moderat tercapai 100%. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 nilai USBN belum mendapatkan data penilaian USBN. Nilai USBN akan diperoleh pada triwulan II tahun 2020.

8. **Sasaran program 8, Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat bergama**

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu prosentase kasus konflik intra umat beragama yang terselesaikan tercapai 100%. Sampai pada triwulan I tahun 2020 indikator kinerja utama ini belum

dapat diberikan nilai capaiannya karena belum ada konflik intra umat beragam Buddha.

Ditjen Bimas Buddha dalam mengantisipasi terjadinya konflik sudah dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap tokoh, lembaga, majelis, dan organsiasi keagamaan Buddha melalui kegiatan dialog kerukunan umat Buddha yang dilakukan oleh Pembimas Buddha.

9. Sasaran program 9, Meningkatnya ekspresi budaya bernafas agama

Sasaran program ini akan tercapai jika indikator kinerja utama yaitu persentase lembaga seni budaya keagamaan yang terbina tercapai 100%. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 indikator kinerja utama masih 0% karena pembinana terhadap lembaga seni budaya keagamaan dilaksanakan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV tahun 2020.

Untuk pencapaian sasaran program didukung oleh indikator kegiatan yang relevan dengan indikator kinerja utama yaitu pembinaan lembaga seni budaya keagamaan dan pemberian bantuan terhadap lembaga seni budaya keagamaan.

10. Sasaran program 10, Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan

Sasaran program ini akan tercaai jika dua indikator yaitu persentase layanan adminstrasi keagamaan yang digitalisasi dan prosentase kitab suci yang terdistribusi tepat sasaran tercapai 100%. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 untuk indikator persentase layanan administrasi keagamaan yang digitalisasi tercapai 21,05% atau 42,1% dari target 50%. Layanan pada Ditjen Bimas Buddha terdapat 19 layanan keagamaan dan yang sudah digitalisasi atau dilaksanakan dengan system aplikasi sebanyak 4 layanan yaitu layanan tanda daftar rumah ibadah, tanda daftar lembaga keagamaan, tanda daftar yayasan, dan tanda daftar majelis keagamaan. Ditjen Bimas Buddha terus melakukan inovasi terhadap layanan keagamaan Buddha dengan mengintegrasikan semua layanan dalam satu system agar lebih mudah, cepat dan menyenangkan baik bagi tenaga pelayanan maupun peneria layanan.

Untuk indikator prosentase kitab suci yang terdistribusi tepat sasaran tidak dapat diukur karena tahun anggaran 2020 tidak ada pengadaan kita suci sehingga tidak ada pendistribusian ktab suci.

B. Capaian Anggaran Triwulan I Tahun 2020

1. Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2020

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan mewujudkan sasaran program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mendapat alokasi anggaran pada DIPA tahun 2020 sebesar Rp.244.310.235.000,-. Dengan alokasi anggaran untuk satuan kerja pusat Rp.38.945.677000,- atau 16% dan untuk satuan kerja daerah Rp.205.364.558.000,- atau 84%.

a. Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2020 dialokasikan untuk fungsi pendidikan, dan fungsi agama. Sesuai dengan besarnya ruang lingkup dan sasaran serta prioritas nasional yang hendak dicapai, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk fungsi pendidikan yang meliputi jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi keagamaan Buddha.

Selanjutnya anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang dialokasikan untuk fungsi agama dimanfaatkan sebagai sumber dana dalam pembinaan dan pelayanan keagamaan Buddha. Anggaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2020 berdasarkan fungsi sebagaimana terlihat dalam diagram berikut:

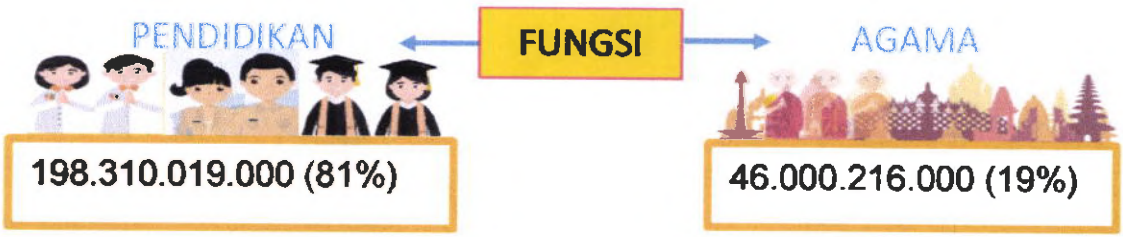

b. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan, anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2020 dialokasikan untuk 5 (lima) kegiatan yang terdapat dalam DIPA Ditjen Bimas Buddha sebagai berikut :

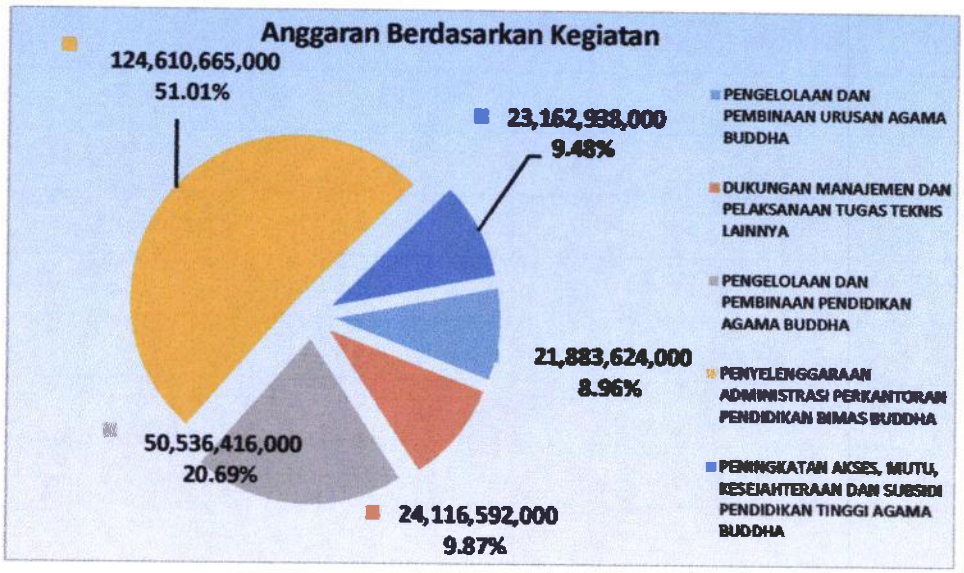

2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakt Buddha Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha per 31 Maret 2020 adalah Rp.**36.998.447.874**,- atau sebesar 15,14%. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berdasarkan fungsi, kegiatan dan satuan kerja adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

b. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

C. Kendala dan rencana tindak

Sampai dengan triwulan I tahun 2020 kendala yang dihadapi Ditjen Bimas Buddha adalah:

1. Data dalam renstra Ditjen Bimas Buddha belum akurat
2. Sulitnya mengumpulkan data capaian kinerja
3. Dengan adanya pandemi covid 19 menjadikan semua rencana kegiatan yang mendukung pencapaian IKU menjadi terhambat atau tertunda
4. Belum adanya metode pengukuran IKU yang ditetapkan
5. Terdapat indikator yang susah dalam pengukurannya karena tidak terdapat indikator kegiatan pendukung

Dengan adanya kendala tersebut Ditjen Bimas Buddha membuat rencana tindak untuk menyelesaiannya yaitu:

1. Menata ulang data yang akan dijadikan target dalam renstra
2. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data capaian kinerja
3. Menyusun rencana pencapaian target kinerja selama pandemi berlangsung

4. Menyusun dan menentapkan metode pengukuran IKU sehingga setiap penyusuna laporan akan dapat disajikan data yang sesuai
5. Melakukan revisi perjanjian kinerja dengan menghapus indikator yang tidak sesuai dang tidak dapat diukur seperti persentase kitab suci yang terdistribusi tetap sasaran. Indikator ini tidak dapat dilakukan pengukuran karena tahun 2020 tidak ada pengadaan kita suci.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Ditjen Bimas Buddha menyusun Laporan Kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Ditjen Bimas Buddha sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Pencapaian kinerj Ditjen Bimas Buddha pada triwulan I tahun 2020 belum dapat menunjukkan capaian kinerja yang memadai karena adanya beberapa kendala. Namun Ditjen Bimas Buddha terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja atas pencapaian target indikator kinerja utama.

Belum tercapainya target kinerja pada indikator kinerja utama juga adanya kebjakan pemerintah untuk melakukan kerja dirumah selama pandemi Covid 19 ini melanda negara Indonesia sejak bulan Febrari 2020. Dengan laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan mengambil kebijakan untuk mempercepat pencapaian target indikator kinerja utama serta pelaksanaan kegiatan pendukungnya.

Jakarta, April 2020
Direktur Jenderal

CALIADI